



Integrasi Epistemologi Islam dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kontemporer: Pendekatan Baru untuk Inklusivitas dan Keberlanjutan

Dianing Banyu Asih¹, Mulyawan Safwandy Nugraha²

^{1,2,3}Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Received: 07 July 2025
Revised: 16 July 2025
Accepted: 23 July 2025

Kebijakan pendidikan kontemporer dihadapkan pada tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan akan inklusivitas, sehingga diperlukan pendekatan baru yang mampu merespons perubahan tersebut secara kritis dan adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi epistemologi Islam, yang mengedepankan nilai spiritual dan moral, dalam perancangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan. Fokus utamanya adalah integrasi epistemologi Islam, yang mengedepankan nilai spiritual dan moral, sebagai landasan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji penerapan komprehensif epistemologi Islam dalam kebijakan pendidikan kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi relevansi epistemologi Islam dalam konteks pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih adil, mengatasi ketimpangan akses, dan memberikan solusi untuk keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penggunaan instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf juga dapat memperluas akses pendidikan bagi kelompok marginal, meningkatkan inklusivitas secara nyata. Implikasi dari penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang holistik dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Kata Kunci: Epistemologi Islam; Kebijakan Pendidikan; Maqashid Syariah

(*) Corresponding Author: dianingbanyuasih@gmail.com

How to Cite: Asih, D., & Nugraha, M. (2025). Integration of Islamic Epistemology in Contemporary Education Policy Development. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.B), 46-66. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10946>.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini bergerak sangat cepat dan kompleks, dimana seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan yang signifikan, salah satu dampak dari perkembangan ini adalah terjadinya perubahan pada berbagai kebijakan tidak terkecuali kebijakan pada sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan kontemporer harus dapat merespon berbagai tantangan yang hadir sebagai dampak dari perkembangan zaman dengan cepat, seperti perubahan pada bidang sosial, ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, selain itu adanya kebutuhan akan pendidikan yang bersifat inklusi menuntut para pemangku kebijakan untuk dapat berpikir secara kritis dan adaptif (Yufarika, 2023).

Globalisasi telah memberikan perubahan besar terhadap berbagai aspek kehidupan dimana kehadiran globalisasi telah meningkatkan inteknoneksi dan interdependensi antar negara yang memberikan pengaruh besar terhadap aspek sosial, budaya dan politik, dalam aspek pendidikan globalisasi juga membawa

tantangan yang cukup signifikan (Zainab, 2023). Adapun tantangan dari globalisasi dalam pendidikan diantaranya: (1) Tantangan Standar Global dimana tuntutan untuk mengikuti standar pendidikan yang diterapkan oleh organisasi internasional seperti UNESCO atau OECD, hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk meningkatkan standar dan kualitas pendidikan yang bertujuan agar peserta didik dapat bersaing dipanggung internasional, dampak dari adanya tantangan standar global ini mendorong terjadinya perubahan pada standar kurikulum, metode pembelajaran dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan standar global (Omar & Asmaa, 2022). (2) Mobilitas Global dimana pergerakan manusia pada era globalisasi ini mengalami peningkatan yang berdampak pada kebutuhan sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi keberagaman budaya, bahasa dan pengalaman peserta didik, kondisi ini menuntut kebijakan pendidikan untuk dapat lebih responsif terhadap perbedaan siswa serta kebutuhan akan potensi global siswa seperti penguasaan bahasa asing maupun pemahaman lintas budaya (Fairman et al., 2022). (3) Persaingan Ekonomi Global yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dalam aspek ekonomi, hal ini menuntut sistem pendidikan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan akademik tetapi juga berfokus pada keahlian praktis seperti penguasaan teknologi, bahasa internasional dan berfikir kritis (Basri, 2023).

Kemajuan teknologi telah banyak merubah cara pandang dalam dunia pendidikan seperti cara belajar dan mengajar maupun metode dalam mengakses bahan ajar, keberadaan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan istilah digitalisasi pendidikan dimana penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti penggunaan *platform E-Learning*, *video conference* dan aplikasi pembelajaran daring telah menjadi bagian integral dalam proses pendidikan yang mempercepat transformasi digital pada setiap jenjang Pendidikan (Mahmudah, 2023). Selain melahirkan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan digitalisasi pendidikan juga tentunya melahirkan tantangan dalam pendidikan seperti: (1) *Digital Divide* yaitu terjadinya kesenjangan dalam perolehan akses pendidikan yang berkualitas, misalnya ketimpangan penggunaan akses teknologi yang terjadi pada daerah maju dan tertinggal serta antara keluarga miskin dan kaya (Putri et al., 2024). (2) Kesiapan Tenaga Pendidik, digitalisasi pendidikan bukan hanya memerlukan seperangkat alat pendukung dalam proses pembelajaran tetapi juga memerlukan tenaga pendidik yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi pembelajaran akan tetapi mampu mengoperasikan perangkat teknologi digital untuk mendukung tercapainya tujuan dari proses pembelajaran, akan tetapi tidak semua pendidik memiliki kemampuan dan kesempatan untuk meningkatkan keahlian dalam penguasaan perangkat digital sehingga pemerintah perlu mencanangkan kebijakan terkait dengan pemberian pelatihan penggunaan perangkat digital terutama bagi pendidik yang berada di daerah terpencil (Anggraeni et al., 2023). (3) Konten Pembelajaran Adaptif di mana keberadaan teknologi memungkinkan terjadinya pengembangan konten pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif dan sesuai dengan kebutuhan individu maupun lembaga pendidikan, akan tetapi dengan maraknya penggunaan konten belajar berbasis teknologi diperlukan seperangkat kebijakan yang mendukung dan melindungi moral dan etika peserta didik (Putra et al., 2024).

Inklusivitas merupakan upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk memastikan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, disabilitas maupun etnisitas, semuanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, akan tetapi pada kenyataannya penerapan inklusifitas dalam pendidikan belum sepenuhnya dapat dilakukan karena di sebagian negara masih terjadi diskriminasi dalam pemberian akses pendidikan pada beberapa kelompok Masyarakat (Yunus et al., 2023). Adapun kelompok masyarakat yang seringkali mendapatkan diskriminasi pendidikan adalah: (1) Kaum Disabilitas yang sering kali diabaikan keberadaannya terutama pada sistem pendidikan tradisional untuk itu diperlukan pendidikan inklusif yang mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam sekolah umum dengan menyediakan lingkungan pendidikan yang ramah penyandang disabilitas dan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam pengajaran bagi siswa disabilitas (Rifki et al., 2024). (2) Gender, di beberapa negara masih terjadi kesenjangan dalam perolehan akses pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan gender dimana anak perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam memperoleh pendidikan hal ini dapat disebabkan oleh faktor budaya, sosial maupun ekonomi untuk itu diperlukan pendidikan inklusif yang mendukung kesetaraan gender dalam pemberian Pendidikan (Sholikhudin, 2016). (3) Kesenjangan Ekonomi dan Geografis, di beberapa negara anak-anak yang lahir dari keluarga berpenghasilan rendah atau berasal dari daerah terpencil memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas di bandingkan dengan anak-anak yang lahir dari keluarga menengah atas dan tinggal di kota besar, untuk itu diperlukan pendidikan inklusif yang menyediakan program beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan terutama di daerah terpencil (Mishra et al., 2023).

Dalam menghadapi perubahan globalisasi, kemajuan teknologi dan upaya untuk mewujudkan pendidikan inklusif, integrasi nilai-nilai spiritual, moral dan epistemologi islam memiliki peran yang sangat penting dalam merancang kebijakan pendidikan kontemporer yang tidak hanya berorientasi terhadap efisiensi dan kompetensi akan tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara holistik melalui pendekatan pendidikan yang lebih mendalam, etis dan manusiawi. Pendidikan dalam perspektif islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki kompetensi secara intelektual saja, akan tetapi pendidikan berorientasi kepada pengenalan seorang hamba terhadap Tuhan, memiliki akhlak mulia dan memahami hakikat tujuan penciptaanya di muka bumi ini. Sehingga wahyu menjadi rujukan utama dalam epistemologi islam. Integrasi nilai spiritual ini dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam kebijakan pendidikan yang akan memberikan pengaruh terhadap pendidikan yang berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan akhlak dan etika (Hasbiyalloh & Sulhan, 2023). Dalam konteks kebijakan pendidikan kontemporer, nilai-nilai spiritual ini tidak hanya mengejar capaian akademik tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, keadilan dan keberlanjutan, sehingga peserta didik yang dibentuk tidak hanya siap menjadi seorang pekerja yang produktif tetapi juga sebagai individu yang memiliki kesadaran moral dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya (Rozalina, 2020).

Epistemologi Islam menekankan pada pentingnya rasa keadilan, kesetaraan dan tanggung jawab sosial, nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip inklusifitas yang ingin dicapai dalam pendidikan modern dimana setiap individu dapat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa menghiraukan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi fisik. Integrasi nilai moral islam dapat memperkuat upaya terwujudnya inklusifitas dengan menekankan urgensi pemberian sikap adil dan perhatian terhadap kelompok-kelompok yang seringkali terpinggirkan, sehingga kebijakan pendidikan kontemporer harus dirancang untuk memastikan bahwa kesenjangan sosial dalam pendidikan dapat diminimalisir dan bahwa setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi manusia yang berpendidikan (Murdianto, 2024). Etika Islam juga mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam sistem Pendidikan (Suradi, 2018), sehingga kebijakan pendidikan yang dibangun diatas pondasi etika islam akan mendorong lahirnya transparansi dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas dalam implementasi program pendidikan yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang digagas oleh pemerintah.

Dalam kerangka Maqashid Syariah salah satu tujuan utama pendidikan adalah mempromosikan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan (Dodi, 2018). Pendidikan berkelanjutan dalam perspektif islam haruslah memperhatikan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, selain itu pendidikan berkelanjutan berfokus pada pembangunan moral dan spiritual yang seimbang yang tidak hanya menekankan pada kesejahteraan kehidupan di dunia tapi juga kehidupan di akhirat. Epistemologi islam yang mencakup sumber pengetahuan yang berasal dari wahyu, akal dan pengalaman manusia dapat memberikan perspektif baru dalam proses perancangan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan yang tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek tetapi juga tujuan jangka Panjang yang mencakup kebahagiaan dan kesejahteraan holistik manusia (Husni & Hayden, 2024).

Meskipun epistemologi islam menawarkan potensi besar yang dapat memperkaya kebijakan pendidikan modern, namun pada kenyataan dilapangan para pemangku kebijakan lebih cenderung untuk menggunakan paradigma barat yang memfokuskan pada pencapaian hasil material, efisiensi dan kompetensi global dalam melakukan perumusan maupun perencanaan kebijakan hal ini mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap dimensi moral dan spiritual yang merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter manusia yang bertakwa dan berakhhlak mulia. Dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep epistemologi islam yang relevan dengan kebijakan pendidikan kontemporer dan menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan kebijakan berbasis epistemologi islam untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review sebagai kerangka utama untuk menganalisis integrasi epistemologi Islam dalam pengembangan kebijakan pendidikan kontemporer yang inklusif dan

berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat eksploratif dan berfokus pada penggalian konsep-konsep teoritis yang relevan dalam konteks kebijakan pendidikan Islam dan tantangan pendidikan kontemporer (Pratama & Apriani, 2023).

Desain penelitian ini berfokus pada studi pustaka yang mendalam untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis konsep-konsep epistemologi Islam yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan modern. Studi literatur akan mencakup kajian terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan epistemologi Islam, kebijakan pendidikan kontemporer, dan prinsip-prinsip inklusivitas serta keberlanjutan dalam pendidikan. Penelitian ini akan memanfaatkan sumber-sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta publikasi akademik yang relevan (S et al., 2024). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami berbagai teori dan konsep kunci yang dapat diterapkan dalam kebijakan pendidikan, serta memberikan kontribusi baru dalam literatur yang ada dengan menawarkan pendekatan yang didasarkan pada integrasi epistemologi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari pemanfaatan perpustakaan akademik, database jurnal ilmiah seperti *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, *Harzing's Publish or Perish*, *Open Knowledge Maps* dan referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, untuk pengumpulan referensi penulis menggunakan aplikasi Mendeley yang akan memudahkan pengecekan referensi dari penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian literatur yang sistematis dengan beberapa tahapan seperti identifikasi kata kunci seperti “Epistemologi Islam”, “Maqashid Syari’ah”, “kebijakan pendidikan inklusif”, “pendidikan berkelanjutan”, “integrasi nilai-nilai Islam”, “pendidikan modern”, dan “keadilan pendidikan”. Setelah dilakukan identifikasi literatur yang dirasa memiliki relevansi dengan tema penelitian akan dipilih dan dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian.

Teknis analisa data dalam penelitian ini adalah analisis konten dimana data yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang relevan dengan topik penelitian, analisis konten dalam penelitian ini akan difokuskan pada beberapa aspek seperti: Konsep utama dari epistemologi Islam yang berkaitan dengan pendidikan, seperti peran wahyu, akal, dan pengalaman dalam pembentukan pengetahuan. Penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kebijakan pendidikan, dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan modern. Tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan epistemologi Islam dengan kebijakan pendidikan kontemporer, terutama dalam konteks inklusivitas dan keberlanjutan.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Epistemologi Islam dan Sumber Pengetahuan

Epistemologi secara bahasa berasal dari kata episteme yang memiliki arti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau pemikiran, epistemologi sering juga diartikan sebagai teori pengetahuan mendasar yang menelaah karakteristik dan macam-macam pengetahuan, bagaimana hubungan pengetahuan dengan kebenaran

dan bagaimana cara Menyusun sebuah pengetahuan dengan benar (Azwar & Muliono, 2020). Epistemologi Islam merupakan cabang dari epistemologi yang didasarkan pada prinsip-prinsip islam yang membahas bagaimana cara seorang manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan bagaimana islam memandang konteks pengetahuan tersebut. Epistemologi Islam tidak hanya memfokuskan pengetahuan secara empiris ataupun rasional, akan tetapi epistemologi islam mencoba untuk mengintegrasikan pengetahuan empiris dan rasional ini dengan dimensi spiritual, moral, transendental yang berlandaskan pada wahyu dan ajaran syariah, tujuan dari impelmentasi epistemologi islam ini adalah tercapainya tujuan ilmu pengetahuan yang tidak hanya untuk kemanfaatan duniawi akan tetapi untuk mencapai kebenaran ilahiyyah dan kebahagiaan akhirat (Alkhadafi, 2024).

Epistemologi islam memiliki tiga sumber pengetahuan yaitu: *Pertama*, Wahyu yang merupakan kalam Ilahi yang diturunkan kepada para nabi, umat islam memiliki kitab suci al-Qur'an yang merupakan sumber pengetahuan utama dan bersifat mutlak karena al-qur'an bersifat transcendental dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, isi al-Qur'an mencakup pengetahuan yang berisi prinsip-prinsip keimanan, moralitas, aturan-atauran sosial dan hukum yang sudah selayaknya menjadi pedoman hidup manusia (Bakri & Anwar, 2018). Dalam konteks pendidikan, al-Qur'an menekankan pentingnya pendidikan moral dan akhlak mulia serta pembentukan manusia yang berilmu dan bertakwa. Salah satu ayat yang menekankan bahwa proses pendidikan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia tercantum dari Q.S. al-'Alaq ayat 1-5 yang artinya, "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.*" Selain Al-Qur'an, hadis juga menjadi sumber pengetahuan yang menjelaskan isi al-Qur'an terutama pada aktivitas-aktivitas yang membutuhkan contoh praktis seperti contoh pelaksanaan shalat, tayammum, haji dan lain sebagainya yang merupakan contoh dari pendidikan agama islam (Bhari et al., 2018). Dari sumber pengetahuan wahyu ini manusia belajar tentang nilai-nilai fundamental dalam kehidupan seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan umum yang merupakan nilai-nilai penting dalam pengembangan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan islam kontemporer.

Kedua, Akal adalah alat yang membuat manusia dapat berpikir, menganalisa dan menarik kesimpulan, dalam islam akal dihargai sebagai instrument penting dalam memperoleh pengetahuan terutama untuk pengetahuan yang bersifat rasional dan logis, namun keberadaan akal tidak boleh melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh wahyu (Rizapoor et al., 2023), karena sejatinya keberadaan akal adalah untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 164 yang artinya, "*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.*" Akal merupakan alat untuk memahami teks wahyu, memecahkan masalah dan

mengembangkan cara berpikir rasional dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang sesuai syariah, dalam konteks kebijakan pendidikan akal dapat digunakan untuk membuat kurikulum, sistem pembelajaran dan metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Ketiga, Pengalaman (Empiris) diperoleh melalui indra manusia seperti pengelihan, pendengaran dan sentuhan, pengalaman ini memberikan pengetahuan tentang alam sekitar yang bisa dirasakan oleh indra manusia, islam menghargai pengalaman empiris sebagai komponen dalam terciptanya ilmu pengetahuan namun tentunya harus senantiasa dipandu oleh nilai-nilai moral dan wahyu (Nurdin et al., 2019). Dalam konteks pendidikan pengetahuan empiris memainkan peranan penting dalam membantu manusia dalam memahami fenomena yang terjadi disekitarnya, akan tetapi peranan penting tersebut tidak boleh berdiri sendiri akan tetapi harus senantiasa dipandu oleh etika moral dan spiritual yang berasal dari wahyu.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep utama dalam syariah islam yang merujuk pada tujuan-tujuan dasar hukum islam, tujuan maqashid syariah secara umum adalah untuk melindungi dan memelihara lima kebutuhan pokok manusia yaitu:

- a. Perlindungan dan Pengembangan Agama: Pendidikan harus dirancang untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan peserta didik karena salah satu tujuan pendidikan islam adalah memastikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama yang dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat islam.
- b. Perlindungan Kehidupan: Pendidikan memiliki tujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia yang meliputi aspek Kesehatan fisik dan mental, kesejahteraan, keterampilan yang berkorelasi dengan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik terhadap kehidupannya.
- c. Pengembangan Akal: Pengembangan intelektual melalui proses pendidikan sangat ditekankan dalam islam, pada proses pendidikan peserta didik di dorong untuk mengoptimalkan keberadaan akal dengan melatihnya untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif sambil diberikan pemahaman bahwa akal yang digunakan sesuai dengan tuntunan wahyu akan membawa kebaikan dalam kehidupan, sehingga fungsi akal tidak hanya menunjang pencapaian akademik tetapi dapat dijadikan sebagai pembentuk nilai kehidupan yang mengantarkan pada pemahaman benar dan salah, baik dan buruk, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam kehidupan.
- d. Perlindungan Keturunan: Pendidikan tidak dapat hanya dimaknai sebagai transfer ilmu pengetahuan yang bersifat akademis, akan tetapi pendidikan juga harus mencakup pembinaan karakter dan moral yang baik, dimana pembinaan ini akan melahirkan nilai-nilai islam salah satunya adalah pentingnya menjaga keluarga, membangun masyarakat yang kuat serta mempertahankan etika dalam pergaulan dan reproduksi.
- e. Perlindungan Harta: Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta dengan baik, sehingga pendidikan yang diberikan kepada peserta didik juga harus mencakup pengajaran tentang

bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat memberikan kontribusi pada kesejateraan ekonomi umat (Busyro, 2019).

Kebijakan Pendidikan Kontemporer: Prinsip-prinsip Dasar dan Tantangan

Pengembangan kebijakan pendidikan kontemporer sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, dinamika sosial, ekonomi dan teknologi yang terus berkembang baik ditingkat lokal maupun global. Kebijakan pendidikan modern bertujuan untuk merespon kebutuhan yang kompleks dan beragam namun tetap dapat menjaga nilai relevansi, efisiensi dan inklusivitas (Eden et al., 2023). Dalam prosesnya kebijakan pendidikan kontemporer memiliki prinsip-prinsip dasar dan tantangan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah uraian terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kebijakan pendidikan kontemporer beserta tantangan yang menyertainya.

Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan Kebijakan Kontemporer adalah sebagai Berikut:

a. Pendekatan Berbasis Bukti

Salah satu prinsip dasar dalam pengambilan sebuah kebijakan kontemporer adalah melakukan pendekatan berbasis bukti yang menekankan pada penggunaan data empiris dan penelitian yang dapat mendukung proses perumusan dan implementasi kebijakan, pendekatan berbasis bukti memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti : *Pertama*, Pengumpulan Data dari berbagai sumber termasuk hasil penelitian akademis, survei dan evaluasi pendidikan dan hasil studi kasus untuk menganalisis tantangan dan keberhasilan sistem pendidikan. *Kedua*, Evaluasi Kebijakan yang ada yaitu penggunaan indikator-indikator kinerja seperti tingkat partisipatif, pencapaian akademik, angka putus sekolah yang memberikan informasi yang dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih efektif. *Ketiga*, Proses Pengambilan Keputusan dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti ilmiah dapat digunakan untuk mendesain kurikulum, mengalokasikan sumber daya dan memutuskan prioritas reformasi Pendidikan (Luján, 2023).

b. Integrasi Teknologi dalam Pendidikan

Teknologi memainkan peranan penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan kontemporer, transformasi digital telah merubah cara bagaimana pendidikan diakses, disampaikan dan dikelola, integrasi teknologi dalam pendidikan mencakup penggunaan media informasi dan komunikasi seperti : *Pertama*, penggunaan E-Learning dalam pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan siswa dapat mengakses materi pendidikan dari mana saja seperti yang telah dilakukan pada masa pandemi. *Kedua*, Penggunaan Teknologi untuk Manajemen Sekolah, sistem informasi pada manajemen pendidikan telah membantu sekolah maupun pemerintah dalam proses administrasi pada lembaga pendidikan. *Ketiga*, Mendorong Literasi Digital pengembangan kebijakan pendidikan modern juga mencakup program-program yang mendorong peningkatan keterampilan siswa dan guru dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran (Trianung D.S et al., 2024).

c. Fleksibilitas dan Adaptabilitas Kebijakan

Kebijakan pendidikan kontemporer perlu memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas untuk merespon perubahan yang cepat dalam era globalisasi ini,

kebijakan yang terlalu kaku sering mengakibatkan kegagalan dalam merespon perubahan sosial dan teknologi yang dinamis (Ninad et al., 2023). Dalam konteks pendidikan fleksibilitas sering terjadi pada perubahan kurikulum dimana perkembangan kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah, sedangkan adaptasi pendidikan seringkali dilakukan pada kondisi-kondisi krisis seperti terjadinya pandemi covid 19 (Adam et al., 2024).

d. Pendidikan Inklusif Berkeadilan

Kebijakan pendidikan kontemporer menekankan inklusivitas dan keadilan yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua siswa terlepas dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, gender atau disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, prinsip ini menuntut para pemangku kebijakan untuk menghapuskan hambatan terhadap akses pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung kebutuhan siswa (Khairunnisa, 2024).

Salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan pendidikan kontemporer adalah ketimpangan pada akses terhadap pendidikan berkualitas, meskipun akses pendidikan dasar saat ini sudah meluas di banyak negara tetapi saja masih ada ketimpangan signifikan dalam perolehan akses pendidikan di berbagai tingkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

a. Ketimpangan Akses Pendidikan

- 1) Ketimpangan Geografis, siswa yang berada di daerah terpencil memiliki kesempatan memperoleh akses pendidikan berkualitas yang lebih kecil dengan siswa diperkotaan dimana infrastruktur dan akses teknologi di daerah terpencil masih sangat terbatas (Firdaus & Ritonga, 2024).
- 2) Faktor Ekonomi, anak-anak yang lahir dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali menghadapi hambatan biaya yang menjadi penghambat dalam memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas termasuk kesulitan dalam biaya sekolah, buku, seragam dan transportasi (Perdana et al., 2024).
- 3) Kesenjangan Gender, di beberapa negara anak Perempuan diberikan akses pendidikan yang sangat kecil bila dibandingkan dengan akses pendidikan yang diberikan kepada anak laki-laki, hal ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi budaya, sosial, ekonomi di sebuah wilayah (Damayanti P et al., 2023).

b. Keberlanjutan Pendidikan

Pendidikan yang berkelanjutan mengacu kepada sistem pendidikan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tantangan keberlanjutan dalam pendidikan terkait dengan :

- 1) Pengelolaan Sumber Daya, pengembangan kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan pengelolaan sumber daya terbatas yang dimiliki, seperti anggaran pendidikan, sumber daya pendidikan, sarana prasarana yang harus dikelola dan dipergunakan secara efisien dan berkelanjutan (Acido & Kilongkilong, Dennis, 2022).
- 2) Keberlanjutan Lingkungan, pendidikan juga berperan penting dalam mengajarkan siswa tentang keberlanjutan lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian bumi melalui kurikulum yang berfokus pada isu-isu global seperti perubahan iklim dan konservasi alam (Llopiz-Guerra et al., 2024).

c. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan menjadi tantangan besar di banyak negara, salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah kualitas pembelajaran yang diterima siswa sering kali tidak merata, adapun faktor yang mempengaruhi hal ini diantaranya :

- 1) Kurangnya Tenaga Pengajar yang Berkualitas, kualitas guru atau tenaga pendidik sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pembelajaran siswa, sayangnya kompetensi guru saat ini belum belum merata hal ini terlihat dari kesenjangan kompetensi antara guru yang berada di daerah perkotaan dengan guru yang berada di daerah terpencil (Nasir et al., 2020).
- 2) Kurikulum yang Tidak Relevan, permasalahan utama dalam kurikulum adanya kesenjangan antara kurikulum yang diberikan dengan skill yang dibutuhkan di dunia kerja dan perkembangan teknologi, yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran (Halizah, 2024).
- 3) Kurangnya Sumber Daya Pendidikan, di beberapa daerah masih banyak siswa yang mengalami kesulitan finansial yang berpengaruh terhadap perolehan akses terhadap sarana pendukung pendidikan seperti buku, seragam, keterpenuhan gizi, dan transportasi (Perdana et al., 2024).

Pembahasan

Tinjauan Penelitian Sebelumnya Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Islam dalam Kebijakan Publik

Penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip islam dalam kebijakan publik menjadi pembahasan yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, kesehatan tidak terkecuali pendidikan, islam dengan ajaran komperhensifnya yang mencakup aspek spiritual, moral dan sosial telah menyediakan landasan filosofis dan normatif yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai islam dapat berperan pada pembentukan kebijakan yang adil, inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1) Penerapan Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik

Salah satu aspek yang sering dibahas dalam penelitian sebelumnya adalah Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syari'ah) yang menjadi kerangka dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis islam. Maqashid Syariah menekankan pada perlindungan lima prinsip utama kehidupan dalam islam, yaitu : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta(Sabil, 2022). Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka maqashid Syariah ini dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan publik yang tujuannya adalah memastikan kesejahteraan manusia secara holistik yang mencakup dunia nihi dan ukhrawi, beberapa contoh penelitian kebijakan publik yang menggunakan kerangka Maqashid Syariah adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Kesehatan: (Perlindungan Jiwa)

Contoh: Program Kesehatan Universal di Arab Saudi

Arab Saudi mengembangkan kebijakan kesehatan berbasis Maqashid Syariah dengan meluncurkan program Kesehatan Universal yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau kepada seluruh warga negara seperti: (1) Pemberian layanan kesehatan gratis dalam rangka melindungi jiwa, pemerintah Arab Saudi memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga

negara di rumah sakit dan klinik -klinik milik pemerintah. Kebijakan ini mencakup perawatan medis, obat-obatan, dan layanan pencegahan penyakit. (2) Pencegahan penyakit, Sejalan dengan Maqashid Syariah yang mendorong perlindungan kehidupan, kebijakan ini juga menekankan pentingnya program pencegahan penyakit seperti pemberian vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, serta kampanye tentang kesadaran kesehatan untuk mencegah penyakit yang dapat membahayakan nyawa. (3) Perawatan Jamaah Haji, Arab Saudi juga memastikan perlindungan terhadap jiwa jutaan jamaah yang melaksanakan ibadah haji dengan menyediakan layanan kesehatan darurat yang berkualitas selama pelaksanaan ibadah haji, mengingat pentingnya kesehatan bagi pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Kebijakan ini sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yang bertujuan untuk melindungi jiwa (nafs), yaitu dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai dan berkualitas (Al-Qusumi, 2024).

2. Kebijakan Ekonomi (Perlindungan Harta)

Contoh: Zakat Sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan di Malaysia.

Di Malaysia, zakat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang berbasis pada Maqashid Syariah, khususnya terkait dengan perlindungan harta (maal). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari orang yang kaya kepada orang yang miskin, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Adapun Kebijakan terkait Zakat yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia adalah sebagai berikut : (1) Distribusi Zakat: Kebijakan ini mengharuskan setiap Muslim yang mampu untuk membayar zakat, yang kemudian akan dikelola oleh lembaga zakat negara dan didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang terlilit utang. Hal ini sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu untuk melindungi harta dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. (2) Program Zakat Produktif: Zakat tidak hanya didistribusikan sebagai bantuan tunai, tetapi juga digunakan untuk membiayai program-program produktif, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi keluarga miskin, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Ini merupakan implementasi Maqashid Syariah untuk menjaga kesejahteraan jangka panjang dengan memastikan bahwa penerima zakat tidak bergantung terus-menerus pada bantuan, tetapi dapat mandiri secara ekonomi. (3) Perlindungan Terhadap Keuangan, Kebijakan zakat ini juga mencegah konsentrasi kekayaan hanya berputar pada segelintir orang, hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan ekonomi, dimana kemerataan ekonomi menjadi tujuan dari Maqashid Syariah dalam aspek menjaga harta (Dahiru Muhammad, 2024).

3. Kebijakan Pendidikan (Perlindungan Akal)

Contoh: Kebijakan Pendidikan Gratis di Turki.

Di Turki Pemerintah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk semua warga negara di tingkat sekolah dasar hingga menengah. Kebijakan ini didasarkan pada Maqashid Syariah, yang bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan akal (aql) sebagai salah satu elemen utama yang harus dijaga

dalam Islam. Dengan menyediakan akses pendidikan yang luas dan gratis, Pemerintah Turki berupaya untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Kebijakan Pendidikan Gratis di Turki meliputi: (1) Pendidikan Gratis untuk Semua, Pendidikan gratis di Turki dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, yang memungkinkan semua anak tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, dapat memperoleh pendidikan. Ini sejalan dengan prinsip dari Maqashid Syariah yang mendorong pengembangan akal melalui sistem pendidikan dan pengetahuan yang benar. (2) Kurikulum yang Berorientasi pada Nilai-Nilai Islam: Selain memberikan pendidikan umum, Turki juga mengintegrasikan pendidikan moral dan agama dalam kurikulumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, yang sesuai dengan tujuan pendidikan dalam prinsip Maqashid Syariah. (3) Program Inklusi Sosial: Untuk mendukung inklusivitas, kebijakan pendidikan ini juga mencakup program-program khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus (Disabilitas), yang memastikan bahwa semua anak dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas, tanpa adanya diskriminasi. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan keadilan sosial dan pengembangan potensi setiap individu (Barkatillah, 2023).

2) Penerapan Prinsip-Prinsip Religius dalam Kebijakan Pendidikan

Beberapa penelitian juga mengkaji integrasi antara nilai-nilai religious dan moral Islam dalam sistem pendidikan formal, sebuah studi yang telah dilakukan di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai islam dalam kebijakan pendidikan dapat menciptakan keseimbangan antara aspek akademis dan karakter moral. Di Malaysia, kebijakan pendidikan islam secara eksplisit diintegrasikan dalam kurikulum nasional, dimana pendidikan agama menjadi bagian penting dalam pengajaran di sekolah-sekolah negeri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai islam memberikan dampak positif terhadap pembentukan moral siswa (Abd Hamid & Alam, 2022). Di Indonesia implementasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai islam di sekolah-sekolah juga telah menunjukkan dampak yang baik dalam pembentukan siswa yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial (Daryanto & Ernawati, 2024).

Potensi Peran Epistemologi Islam dalam Menjawab Tantangan Kebijakan Pendidikan Kontemporer

Epistemologi islam menawarkan potensi yang signifikan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh kebijakan pendidikan kontemporer, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pengetahuan yang bersumber dari wahyu, akal dan juga pengalaman, epistemology islam dapat memberikan landasan baik secara teoritis maupun praktis dalam perumusan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

1) Menjawab Ketimpangan Akses Pendidikan

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan pendidikan kontemporer adalah terdapatnya ketimpangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau berada di daerah terpencil. Epistemologi islam melalui prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang

diatur sesuai syariah dapat membantu kebijakan pendidikan yang lebih inklusif (Anwar, 2022).

2) Menghadapi Tantangan Keberlanjutan pendidikan

Pendidikan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan global yang cukup mendesak teutama pada aspek pengelolaan sumber daya pendidikan yang efisien dan ramah lingkungan. Epistemologi Islam yang memiliki konsep menjaga kelestarian bumi dan bertanggung jawab terhadap alam dapat memberikan kerangka etis dalam perumusan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan (Hidayat & Bahar, 2024).

3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Integrasi Wahyu dan Akal

Tantangan lain dalam kebijakan pendidikan kontemporer adalah kualitas pendidikan yang tidak merata, terutama dengan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia pekerjaan, pengembangan teknologi dan pengembangan moral siswa, Epistemologi Islam menekankan keseimbangan antara wahyu dan akal sebagai sumber yang saling melengkapi. Dengan memadukan kedua sumber ini, kebijakan pendidikan berbasis yang epistemologi Islam dapat menghasilkan sistem pendidikan yang menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan bertanggung jawab secara sosial (Darmawan, 2024).

4) Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Inklusivitas dan keadilan merupakan tantangan besar dalam kebijakan pendidikan kontemporer, epistemologi Islam menekankan keadilan dalam perolehan akses pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, gender maupun disabilitas, hal ini sejalan dengan ajaran islam yang menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan (Ila Khayati Muflikhah & Abdul Khobir, 2023).

Temuan Utama Tentang Epistemologi Islam dan Kebijakan Pendidikan

Epistemologi Islam menawarkan pandangan menyeluruh tentang pengetahuan yang mencakup dimensi spiritual, moral dan rasional, epistemologi islam sangat relevan dalam penerapan pendidikan seperti dalam pelaksanaan proses pembelajaran serta bagaimana nilai-nilai islam dapat digunakan untuk membentuk kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep-Konsep Kunci dari Epistemologi Islam dalam Konteks Pendidikan berikut ini:

- a. Wahyu sebagai sumber pengetahuan transcendental, wahyu (Al-qur'an dan hadis) merupakan sumber utama pengetahuan dalam epistemologi islam, wahyu dianggap sebagai sumber pengetahuan yang mutlak, tidak terbatas oleh waktu dan tempat, selain itu wahyu juga memberikan petunjuk yang sempurna tentang kehidupan dan tujuan manusia, dalam konteks pendidikan wahyu memiliki peran sebagai landasan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pembentukan karakter peserta didik seperti pengajaran tentang nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat Hal ini menciptakan keseimbangan dalam proses pendidikan, di mana siswa tidak hanya diajarkan keterampilan akademis, tetapi juga nilai-nilai yang membentuk karakter moral mereka (Embong, 2024).
- b. Akal sebagai instrument Pemahaman Rasional, akal dalam islam diakui sebagai salah satu instrument penting dalam memahami dunia,

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan pemecahan masalah. Meskipun wahyu merupakan sumber tertinggi dalam ilmu pengetahuan namun akal merupakan kunci utama dalam menginterpretasikan wahyu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pendidikan. Epsitemologi islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis melalui akal yang disinergikan dengan wahyu, keterpaduan ini akan membentuk manusia yang seimbang antara spiritualitas dan intelektualitas (Sutisna & Mahmudi, 2024).

Pengalaman dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, dalam epistemologi pengalaman dan pengembangan merupakan salah satu instrument untuk dapat memahami alam semesta dan fenomena-fenomena duniawi, dalam konteks pendidikan pemberian pengalaman praktis kepada siswa merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, hal ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dari wahyu dan akal dalam konteks nyata atau sehari-hari. Pengetahuan empiris yang benar juga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan duniawi seorang manusia juga kebaikan untuk kehidupan kelak di akhirat (Sakura et al., 2023).

Analisis tentang Bagaimana Nilai-nilai Islam dapat Memberikan Dasar bagi Pengembangan Kebijakan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan

Epistemologi Islam tidak hanya menawarkan fondasi yang kuat untuk proses pendidikan, tetapi juga memberikan panduan yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan dan berfokus pada Pembangunan jangka Panjang.

- 1) Kebijakan inklusif berdasarkan prinsip keadilan, salah satu prinsip utama dalam ajaran islam adalah keadilan bagi seluruh individu tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi atau etnisitas mereka, dalam konteks pendidikan pemerintah harus dapat memastikan bahwa seluruh warga masyarakat memiliki hak sama dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, untuk mewujudkan kebijakan ini pemerintah dapat memberikan beasiswa, subsidi pendidikan, Pembangunan insfrastruktur pendidikan yang ramah disabilitas dengan memanfaatkan dana zakat, wakaf dan sedekah yang dikelola oleh lembaga zakat milik negara (Hamamah, 2023).
- 2) Kebijakan berkelanjutan Berdasarkan Prinsip kemaslahatan, islam mementingkan aspek kemaslahatan dan mencegah kemadhorotan, dalam konteks kebijakan pendidikan nilai ini dapat diterapkan dalam penciptaan sistem pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan, dimana seluruh aspek dalam kegiatan pendidikan harus dipertimbangkan dampak jangka panjangnya melalui pengajaran tentang keberlanjutan lingkungan, etika penggunaan sumber daya dan tanggung jawab sosial, karena pendidikan islam tidak hanya bertujuan membentuk siswa yang cerdas secara akademik tapi juga memiliki kecerdasan spiritual, moral dan rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat (Nurhayati, 2023).

Kebijakan untuk Pengembangan Potensi Akal dan spiritual, kebijakan pendidikan yang didasarkan pada epistemologi islam harus mengakui pentingnya potensi akal dan spiritual secara bersamaan, untuk dapat mengembangkan kedua potensi itu diperlukan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, penggunaan teknologi dengan pendidikan agama dan moral secara

holistik, sehingga dapat dipastikan siswa tidak dapat berkembang secara akademik dan spiritual (Fatimah & Sumarni, 2024).

Pendekatan Baru untuk Pengembangan Kebijakan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru untuk pengembangan kebijakan pendidikan dengan menggunakan Maqashid Syariah sebagai kerangka utama. Maqashid Syariah, yang berfokus pada perlindungan lima elemen penting (agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta), memberikan panduan komprehensif untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga memperhatikan aspek moral, spiritual, dan sosial untuk membentuk individu yang holistik.

1) Kesejahteraan Sosial (Maslahah)

Maqashid Syariah menekankan pencapaian maslahah atau kesejahteraan sosial, di mana pendidikan berperan tidak hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Dalam pendekatan ini:

- a) Pendidikan diarahkan untuk menciptakan generasi yang bermoral dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.
- b) Pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya melalui pengembangan keterampilan akademis, tetapi juga dengan membentuk karakter dan perilaku sosial yang baik.
- c) Pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan sosial juga harus mencakup pengajaran tentang tanggung jawab sosial, termasuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dan terlibat dalam kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat (Faoziyah, 2023).

2) Keadilan (Al-Adl)

Prinsip keadilan sangat penting dalam Maqashid Syariah dan relevan dalam kebijakan pendidikan inklusif. Keadilan dalam pendidikan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Pendekatan ini mencakup:

- a) Distribusi sumber daya pendidikan yang adil, termasuk penyediaan fasilitas belajar, bahan ajar, dan teknologi di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan.
- b) Pendidikan untuk kelompok rentan: Dalam pendekatan berbasis Maqashid Syariah, kebijakan pendidikan harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari kelompok miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas.
- c) Membangun sistem pendidikan yang mengakomodasi perbedaan kemampuan dan kebutuhan khusus, dengan menyediakan kurikulum yang inklusif dan layanan pendidikan khusus bagi mereka yang membutuhkan (Karimullah, 2023).

3) Keberlanjutan (Istidamah)

Keberlanjutan dalam Maqashid Syariah mencakup keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kebijakan pendidikan yang berfokus pada

keberlanjutan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Implementasi prinsip ini mencakup:

- a) Pendidikan tentang tanggung jawab lingkungan: Kurikulum yang mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Ini sejalan dengan konsep Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.
- b) Keberlanjutan sosial: Pendidikan berkelanjutan juga harus mendukung pembentukan generasi yang sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan sosial, seperti keadilan, perdamaian, dan toleransi. Pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan sosial mencakup pembelajaran tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi berkelanjutan: Mengajarkan siswa untuk memahami etika bisnis Islam, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, dan spesifikasi keadilan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang (Mohd Noh, 2022).

Inklusivitas dan Keberlanjutan dalam Pendidikan Berbasis Islam

Integrasi epistemologi Islam dalam kebijakan pendidikan dapat secara signifikan meningkatkan inklusivitas dan akses pendidikan, terutama bagi kelompok marginal. Prinsip keadilan (al-adl) dan kesetaraan dalam Islam menuntut bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Kebijakan berbasis Islam mendorong penggunaan instrumen zakat dan wakaf untuk mendanai beasiswa, program afirmatif, dan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, yang membantu menciptakan akses setara bagi anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya (Hairiyah et al., 2024). Keberlanjutan dalam pendidikan berbasis Islam mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah yang mengedepankan kesejahteraan jangka panjang:

- a) Keberlanjutan Ekonomi: Pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan melalui instrumen seperti wakaf yang digunakan untuk mendanai institusi pendidikan, serta zakat yang mendukung beasiswa dan program untuk kelompok kurang mampu (Sulistyo et al., 2024).
- b) Keberlanjutan Sosial: Pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter yang berfokus pada tanggung jawab sosial dan moral, membangun generasi yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nuraini & Susiani, 2024).
- c) Keberlanjutan Lingkungan: Prinsip Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi (khalifah fil ardh) mendorong pendidikan yang menanamkan kesadaran lingkungan. Ini tercermin dalam kurikulum yang mengajarkan tentang kelestarian alam, penggunaan sumber daya yang bijak, dan teknologi ramah lingkungan (Ali & Agushi, 2024).

Dengan pendekatan ini, pendidikan berbasis Islam tidak hanya menciptakan sistem yang inklusif tetapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang untuk masyarakat dan lingkungan.

KESIMPULAN

Integrasi epistemologi Islam dalam kebijakan pendidikan kontemporer mampu memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya melalui penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Pendekatan ini mengarahkan kebijakan pendidikan agar tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan jangka panjang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral Islam, yang terintegrasi dalam kebijakan pendidikan, mampu menjawab tantangan-tantangan utama dalam pendidikan kontemporer seperti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok marginal. Selain itu, penggunaan instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf dapat mendukung akses pendidikan bagi kelompok rentan, menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

REFERENSI

- Abd Hamid, N. B., & Alam, N. A. R. (2022). The Educational Orientation of Malaysia: The P.I.E.S Element of a Balanced Person in The National Education Philosophy (NEP) (The Perspective of Islam Through the Interpretation of Sayid Qutb). *Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 6(2), 143–156.
- Acido, J. V., & Kilongkilong, Dennis, A. A. (2022). Resource Management Practices Towards Sustainable Support System During Pandemic. *International Journal of Educational Management and Development Studies*, 3(4), 19–42. <https://doi.org/10.53378/352930>
- Adam, A., Kamaluddin, N., & Mubin, H. (2024). Implementasi Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kepulaun Sula. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 939–954.
- Al-Qusumi, F. (2024). Transforming Healthcare in Saudi Arabia Through Strategic Planning and Innovation. *International Journal Of Integrated Science And Technology*, 2(2), 61–74.
- Ali, M., & Agushi, M. (2024). Eco-Islam: Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living. *International Journal of Religion*, 5(9), 949–957. <https://doi.org/10.61707/gq0we205>
- Alkhadafi, R. (2024). Epistemologi Filsafat Islam. *Jurnal Manajemen, Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 2024.
- Anggraeni, M. D., Mucharromah, R., Taqiyya, B. Z., Fadilah, R. E., Mahardika, I. K., & Yusmar, F. (2023). Perkembangan Teknologi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *FKIP E-PROCEEDING*, 1–5.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Azwar, W., & Muliono. (2020). *Filsafat Ilmu: Cara Mudah Memahami Filsafat Ilmu* (cetakan ke). Prenadamedia group.
- Bakri, & Anwar, M. A. (2018). Manajemen Pendidikan Islam Persepektif Kiai Muh. As'ad Umar. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 117–134.
- Barkatillah. (2023). Pendidikan Islam di Negara Turki. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 102–107. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.195>
- Basri, H. (2023). Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Pendidikan: Perspektif

- Sosiologi Pendidikan. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 128–143. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.446>
- Bhari, M. B., Mustofa, M. Z., & Maghfiroh, K. L. (2018). Materi Pendidikan Islam dalam Hadis Nabi dan Relevansinya dengan Konsep dan Sistem Pendidikan Modern. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 2–15.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah* (satu). Prenadamedia group.
- Dahiru Muhammad, A. (2024). Trends and Developments in Contemporary Zakat Administration. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume*, 5(1), 67–81.
- Damayanti P, D., Tetra R, F., Fajrussalam, H., Aulia R, S., & Syafanisa, T. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, 184(3), 184–188.
- Darmawan, R. (2024). Hakikat Filsafat Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Kepribadian Muslim dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(01), 18–28. <https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.653>
- Daryanto, D., & Ernawati, F. (2024). Integrasi Moral dan Etika dalam Pendidikan Agama Islam. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 9(1), 15–31.
- Dodi, L. (2018). Nilai Spiritualitas Sayyed Hossein Nasr dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 2–20.
- Eden, C. A. E., Chisom, O. N., & Adeniyi, I. S. (2023). Education policy and social change: Examining the impact of reform initiatives on equity and access. *International Journal of Science and Research Archive*, 11(2), 139–146. <https://doi.org/10.30574/ijsra.2024.11.2.0372>
- Embung, R. (2024). Knowledge in the Quran and the Sunnah Leading to an Epistemology. *Qeios, CC-BY 4.0* , 6–13.
- Fairman, B., Voak, A., & Babacan, H. (2022). Human Mobility and Dismantling Cultural Dominance : Creating Collaborative Conversations to Secure Talent in a Post-Covid world Vocational Education and. *Journal of Resilient Economies*, 2(1), 0–1.
- Faoziyah, S. (2023). Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1), 47–56. <https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.677>
- Fatimah, S., & Sumarni, S. (2024). a Holistic Approach To Islamic Basic Education: Synthesizing the Development of Students' Potential From Intellectual, Spiritual and Emotional Aspects. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 106. <https://doi.org/10.22373/pjp.v13i2.24259>
- Firdaus, K., & Ritonga, M. (2024). Peran Teknologi Dalam Mengatasi Krisis Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 9(1), 43–57. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i1.303>
- Hairiyah, Sirait, S., & Arif, M. (2024). The Importance of Islamic Education and Gender Equality in Contemporary Schools. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 7(1), 114–126.
- Halizah, S. N. (2024). Kesenjangan Kurikulum Smk Dengan Kebutuhan Industri. *Adiba: Journal of Education*, 4(2), 227–233.

- Hamamah, F. (2023). Islamic Education and the Principles of Social Justice: Implications for Government Responsibilities in Providing Compensation and Restitution. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), 216. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.396>
- Hasbiyalloh, & Sulhan, M. (2023). *Hadis Tarbawi* (cetakan ke). Remaja Rosda Karya.
- Hidayat, A., & Bahar, E. (2024). Prinsip Epistemologi Islam pada Sekolah Islam Terpadu Amirul. *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 9, 6(9), 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i9.2518>
- Husni, & Hayden, W. (2024). The Epistemology of Ta'dib in Islamic Civilizational Discourse: Reviving and Reconstructing Contemporary Muslim Scholars' Views. *Journal of Al-Tamaddun*, 19(1), 181–197. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.14>
- Ila Khayati Muflikhah, & Abdul Khobir. (2023). Paradigma Filsafat John Dewey dalam Pendidikan Inklusi. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 3(4), 13–22. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v3i4.1117>
- Karimullah, S. S. (2023). Children's Rights in Islam: Towards Gender Equality and Youth Justice. *Muadalah*, 11(2), 87–98. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i2.11113>
- Khairunnisa, N. P. (2024). *Implementasi Filosofi Pendidikan Inklusi Di Indonesia*. UNIKA Atma Jaya.
- Llopiz-Guerra, K., Ruiz, D. U., Hernández, R. M., Mejia, V. L. V., Nunayalle, J. D. R. J., & Sanchez, K. R. (2024). Importance of Environmental Education in the Context of Natural Sustainability. *Natural and Engineering Sciences*, 9(1), 57–71. <https://doi.org/10.28978/nesciences.1473461>
- Luján, J. L. (2023). Evidence-based policies: Lessons from regulatory science. *Politics & Policy*, 51(4), 524–537. <https://doi.org/10.1111/polp.12543>
- Mahmudah, A. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis ICT: Aplikasi Macromedia Flash. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.26594/dirasat>
- Mishra, A., Misha, A., & Pandey, G. (2023). Spatial Inequality and Education: Unraveling the Geographical dimensions of Educational disparities. *Technolearn An International Journal of Educational Technology*, 13(1), 29–43. <https://doi.org/10.30954/2231-4105.01.2023.6>
- Mohd Noh, M. S. (2022). Economic Sustainability From Maqasid Al-Shariah Perspective In Ir 4.0 Era. *Al-Basirah Journal*, 12(2), 153–165. <https://doi.org/10.22452/basirah.vol12no2.11>
- Murdianto. (2024). Implementation of Islamic Education Management to Realize a Superior Education Institution. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 11(1), 150–159. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v11i1.8173>
- Nasir, N., Mujiati, M., Said, H., Pujiyati, W., & Adam. (2020). Pengelolaan Tenaga Pendidik (Guru) di Rural Area. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 37–53. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v20i1.4383>
- Ninad, K. V., Ugandhara, G. P., Hemant, K. P., Seema, J. A., & Sujata, A. (2023). Improvement and Implementation of Contemporary Education System. *Journal of Engineering Education Transformations*, 37(Special Issue), 26–31. <https://doi.org/10.16920/jeet/2023/v37is1/23165>

- Nuraini, R., & Susiani, I. W. (2024). Internalization of Islamic Education Values in Establishing Student Social Characters. *Aqlamuna: Journal of Educational Studies*, 1(2), 289–298. <https://doi.org/10.58223/aqlamuna.v1i2.241>
- Nurdin, A., Samad, A., Astuti, S., & Samad, M. A. (2019). Dasar Epistemologi Dalam Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 454. <https://doi.org/10.22373/jm.v9i2.5183>
- Nurhayati, T. (2023). Global Policy Study of Sustainable Education. *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, 4(July 2022), 127–137.
- Omar, E., & Asmaa, B. H. (2022). Global Issues in Education and Research. *International Journal on Cybernetics & Informatics*, 11(4), 95–112. <https://doi.org/10.5121/ijci.2022.110408>
- Perdama, F. H., Nurfadilla, M. K., Daffa, M. W., Lismaya, S. S., Nurjamilah, S., & Fadilah, F. (2024). Tantangan Finansial Sebagai Salah Satu Penghambat Tercapainya Tujuan Pendidikan. *Amandemen Journal*, 2(1), 54–62. <https://doi.org/10.61166/amd.v2i1.40> Vol.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Putra, R. A., Siregar, W. S., & Gusmaneli, G. (2024). Model Pembelajaran Adaptif: Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran di Era Digital. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(3), 01–09. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i3.832>
- Putri, R. M., Sari, R., Hasanah, U., & Habibillah, Z. (2024). Manfaat dan Kesenjangan Alat Pendidikan di Era Digital. *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 2(1), 46–51.
- Rifki, M., Zannah, S. L., Aulia, N. P., Wijaya, S., & Aris, I. E. (2024). Sinergitas mewujudkan lingkungan inklusifitas berbasis pendidikan multikultural kepada anak tunagrahita ringan. *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 295–306.
- Rizapoer, H., Poya, A., & Athari, Z. (2023). The Relationship Between Prophetic Hadith and Intellect: A Critical Examination of the Scholarly Discourse. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 2(2), 134–151. <https://doi.org/10.24036/insight.v2i2.130>
- Rozalina, E. (2020). *Spirituality in Pedagogy A Qualitative Study of Teachers Values in High School*. 1–7. <https://doi.org/10.4108/eai.30-9-2019.2291169>
- S, G. N., Hana, F., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Sabil, J. D. M. . (2022). *Maqasid Syariah* (M. dan R. Mirsawati (ed.); satu). PT. Rajagrafindo Persada.
- Sakura, R. R., Puspita, H. I. D., Rudianto, R., Sakinah, W., & Arianto, P. Y. (2023). Penerapan Practical Experience untuk Memperkenalkan Sains pada Lingkungan SD Negeri Jember Lor 01 Jember. *PEKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 34–40. <https://doi.org/10.37148/pekat.v2i2.23>
- Sholikhudin, M. A. (2016). Praktik Pemikiran Inklusif-Sosial KH M Sholeh Bahruddin Ngalah Sebagai Manifestasi Pendidikan Multikultural Pesantren.

- Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 2(1), 1–18.
- Sulistyo, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Relevansi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil. *Ahkam*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>
- Suradi, A. (2018). Konsepsi Pendidikan Agama Islam dalam Menyikapi Modernitas. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 2503–3506.
- Sutisna, E., & Mahmudi. (2024). Pendidikan Akal dalam Perspektif Islam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2559–2568. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1411>
- Trianung D.S, T., Sundari, W., Kurniawan, A., Setiawan, N. A., & Aisyah, J. (2024). Education Management: Decision-Making Strategies in Technology Integration in The Digital Age. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 2032–2044. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5141>
- Yufarika, D. S. (2023). Tantangan Dunia Pendidikan Islam dan Implikasinya Terhadap Perubahan Kebijakan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 130–140. <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v5i2.308>
- Yunus, V., Zakso, A., Priyadi, A. T., & Hartoyo, A. (2023). Pendidikan Inklusif Pada Kurikulum Merdeka. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 313–327. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v9i2.2270>
- Zainab, R. (2023). Educational Innovation amidst Globalization: Higher Education Institutions and Societal Integration. *IgMin Research*, 1(2), 154–159. <https://doi.org/10.61927/igmin131>